

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DESA HARAPAN**

### **KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Marhawani<sup>1</sup>, Iqbal Aidar Idrus<sup>2</sup>, Darmawati<sup>3</sup>**

Universitas Andi Djemma<sup>1,2,3</sup>

wanidillara@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi masyarakat Desa Harapan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BLT di Desa Harapan telah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan, namun terdapat tantangan dalam validasi data penerima, di mana beberapa keluarga yang berhak tidak terdaftar, sementara keluarga yang lebih mampu justru menerima bantuan. Hambatan utama dalam penanganan program ini adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan akses informasi yang jelas. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas SDM, transparansi dalam proses distribusi, dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Ketahanan Ekonomi.

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) program and its impact on the economic resilience of the Harapan Village community. The research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The collected data were then analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the implementation of the BLT program in Harapan Village has been conducted according to the established procedures; however, challenges remain in validating recipients' data, as some eligible families were not listed, while some better-off families received assistance. The main obstacles in managing the program include a lack of human resources and limited access to clear information. The proposed solutions involve improving human resource capacity, ensuring transparency in the distribution process, and enhancing communication with the community to promote fairness in aid distribution.*

*Keywords: Implementation, Direct Cash Assistance, Economic Resilience*

## **A. PENDAHULUAN**

Perekonomian desa sebagai pilar utama pembangunan nasional Indonesia menghadapi tantangan kemiskinan struktural yang kompleks, sehingga Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi instrumen strategis perlindungan sosial yang berakar pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 serta rangkaian regulasi komprehensif mulai dari UU No. 13 Tahun 2011 hingga Peraturan Menteri Keuangan No. 108 Tahun 2024. Meskipun Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, telah menerapkan mekanisme penetapan penerima manfaat melalui Peraturan Desa berbasis musyawarah, implementasi di lapangan mengungkap kesenjangan signifikan berupa ketidakakuratan validasi data—di mana keluarga pra-sejahtera terabaikan sementara keluarga mampu menerima bantuan—yang dipicu faktor personal, komunikasi tidak efektif sebagaimana teori George C. Edward III, serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi BLT terhadap peningkatan daya beli masyarakat Desa Harapan guna mengidentifikasi hambatan tersebut, dengan harapan temuan dapat memperkaya teori administrasi publik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam

menciptakan distribusi bantuan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

### **1. Kebijakan Publik**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kebijakan publik strategis bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat prasejahtera melalui jaring pengaman sosial yang menjaga daya beli dan kebutuhan dasar. Mengacu pada model implementasi George C. Edward III, keberhasilan BLT di Desa Harapan bergantung pada sinergi empat faktor krusial: komunikasi yang jelas dan merata, kecukupan sumber daya manusia serta finansial, disposisi pelaksana yang berkomitmen pada keadilan, serta struktur birokrasi yang efisien. Kesenjangan implementasi seperti dugaan nepotisme dan ketidakmerataan penyaluran mencerminkan ketidakseimbangan faktor-faktor tersebut, yang mengakibatkan gagal optimalisasi tujuan utama kebijakan, yaitu ketahanan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan.

### **2. Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan publik merupakan kajian sistematis yang mengevaluasi proses pengambilan keputusan pemerintah melalui tahapan identifikasi masalah, formulasi, implementasi, dan

evaluasi untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi secara efektif. Dengan indikator utama keefektifan, efisiensi, kesesuaian, dan dampak sosial, analisis ini mengintegrasikan teori sistem, rantai kebijakan, serta jaringan kebijakan guna memahami interaksi kompleks antar aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan implementasi kebijakan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategis yang tepat sasaran, memastikan solusi berkelanjutan bagi permasalahan publik yang kompleks.

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan melalui penerapan lapangan oleh lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan indikator utama kesesuaian rancangan-tindakan, komitmen lembaga pelaksana, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang efisien, proses ini dianalisis melalui teori Top-Down yang menekankan arahan pusat, Bottom-Up yang mengutamakan adaptasi lokal, Street-Level Bureaucracy yang menyoroti kebijaksanaan aparatur lapangan, serta model George C. Edward III yang mengintegrasikan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Pendekatan komprehensif ini mengungkap dinamika kompleks antar aktor kebijakan, memungkinkan identifikasi hambatan implementasi serta rekomendasi perbaikan strategis guna menciptakan kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

### **4. Pengaruh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Daya Beli Masyarakat**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berfungsi sebagai instrumen kebijakan efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat rentan di Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan konsumsi rumah tangga, dan efek multiplier pada perekonomian lokal termasuk sektor informal serta UMKM. Dampak positif ini mencakup dorongan aktivitas pasar lokal, pemulihan usaha mikro, serta penguatan ketahanan ekonomi desa; namun, tantangan seperti distribusi tidak merata, ketergantungan jangka panjang, dan kesenjangan informasi menghambat optimalisasi manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan BLT memerlukan integrasi dengan program pemberdayaan berkelanjutan guna membangun kemandirian ekonomi masyarakat, memastikan daya beli yang meningkat bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan mandiri.

## **5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program BLT di Desa**

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa sangat ditentukan oleh sinergi faktor utama seperti mekanisme distribusi yang transparan dan aksesibel, partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi, kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data akurat, kondisi ekonomi-sosial lokal yang memengaruhi pemanfaatan bantuan, serta dukungan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk pengawasan serta pendampingan. Tantangan seperti ketidakmerataan penyaluran, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kemandirian jangka panjang dapat melemahkan dampak positif BLT terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, optimalisasi program memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan berkelanjutan guna memastikan bantuan tepat sasaran dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi desa yang inklusif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini secara metodologis dirancang dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang komprehensif untuk mengkaji implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Harapan,

Kabupaten Luwu Timur, dengan penekanan khusus pada peran komunikasi sebagai variabel krusial keberhasilan kebijakan sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi George C. Edward III. Lokasi penelitian yang dipilih secara strategis mencerminkan karakteristik sosial-ekonomi representatif desa rentan, sementara periode pelaksanaan selama tiga bulan (September-November 2025) memastikan pengumpulan data yang mendalam dan kontekstual melalui kombinasi sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan 17 informan purposive yang terdiri dari 1 Kepala Desa, 3 perangkat desa, 8 penerima BLT dari berbagai kategori ekonomi, 3 tokoh masyarakat, dan 2 perwakilan LSM, dilengkapi observasi partisipatif langsung terhadap dinamika sosial-ekonomi penerima manfaat serta diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menggali perspektif beragam. Data sekunder berupa dokumen resmi seperti laporan kegiatan desa, peraturan perundang-undangan BLT, dan statistik sosial-ekonomi desa memberikan kerangka normatif dan konteks implementasi yang kuat.

Fokus analisis mencakup kualitas komunikasi pemerintah desa-masyarakat, transparansi informasi

penyaluran bantuan, respon partisipasi masyarakat, serta rekomendasi peningkatan komunikasi untuk mengurangi kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan realitas lapangan. Teknik pengumpulan data triangulasi meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, FGD, dan studi dokumentasi, sementara analisis data mengadopsi model Miles dan Huberman yang sistematis: reduksi data melalui penyaringan tema relevan, penyajian data dalam narasi-tabel-grafik yang mudah dipahami, triangulasi sumber untuk validitas, serta verifikasi kesimpulan melalui pengecekan ulang pola temuan. Pendekatan metodologis terintegrasi ini tidak hanya memungkinkan penggambaran akurat terhadap tantangan utama seperti ketidakakuratan validasi data penerima, dugaan nepotisme akibat komunikasi selektif, dan hambatan akses informasi, tetapi juga menghasilkan pemahaman kontekstual mendalam tentang efektivitas BLT dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga Desa Harapan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan empiris yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, khususnya strategi peningkatan transparansi komunikasi, kapasitas aparatur desa, dan partisipasi masyarakat guna optimalisasi program bantuan sosial

tingkat desa yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini secara komprehensif menyimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur— sebagai desa pesisir agraris dengan luas wilayah 20.519 Ha yang terdiri dari tiga dusun (Lampia, Laoli, Makarti), populasi 2.598 jiwa dari 715 Kepala Keluarga (KK) dengan komposisi 1.335 laki-laki dan 1.263 perempuan, di mana 61 KK dikategorikan pra-sejahtera dari total 329 KK—telah berjalan secara prosedural sesuai regulasi nasional dan daerah, berhasil menjangkau 41 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 20,5% dari lebih 200 KK terdata dengan besaran bantuan Rp300.000 per bulan per KK (total alokasi tahunan Rp147.600.000 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 108 Tahun 2024 yang mewajibkan minimal 25% dana desa untuk BLT), sehingga berfungsi efektif sebagai bantalan ekonomi jangka pendek yang krusial dalam mempertahankan daya beli rumah tangga rentan—terutama masyarakat nelayan (31%), petani (33%), peternak (9%), dan pelaku UMKM (11%)—untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, dan Pendidikan anak, sekaligus menciptakan efek multiplier positif pada sirkuit ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap

warung sembako, pedagang keliling, serta sektor informal lainnya, di mana 65% penerima manfaat mengonfirmasi adanya peningkatan konsumsi rumah tangga meskipun 35% masih menilai besaran bantuan belum mencukupi untuk mengatasi guncangan ekonomi struktural yang lebih dalam.

Analisis mendalam berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III terhadap keempat variabel utama menunjukkan tingkat efektivitas keseluruhan mencapai 70-80%, dengan performa relatif baik namun dihantui gap kritis yang menghambat pencapaian ketahanan ekonomi berkelanjutan: pertama, komunikasi (skor 75%) dinilai cukup efektif melalui pendekatan multikanal yang mencakup musyawarah desa, papan pengumuman strategis di lokasi ramai, serta grup WhatsApp RT/RW desa yang memenuhi aspek transmisi informasi terkait kriteria DTKS, jadwal pencairan, dan prosedur verifikasi lapangan, sebagaimana proaktif dikoordinasikan oleh Kepala Desa Mustakim S.Sos; namun kelemahan signifikan terletak pada clarity (kejelasan) akibat penggunaan istilah teknis birokrasi seperti "validasi data DTKS", "KPM", dan "pagu dana desa" yang membingungkan 35% penerima manfaat khususnya lansia dan warga non-digital, konsistensi informasi terganggu oleh perubahan jadwal mendadak, serta minimnya mekanisme feedback dua arah yang menyebabkan distorsi pemahaman dan kesalahpahaman prosedural; kedua, sumber daya (skor 65%) menunjukkan

keterbatasan struktural pada Sumber Daya Manusia (SDM) dengan komposisi organisasi pemerintahan desa yang ramping.

Sistem pengelolaan data masih manual yang memperlambat verifikasi dan pelaporan meskipun transisi digitalisasi aplikasi keuangan desa telah dimulai, ditambah kendala infrastruktur internet lemah di dusun terpencil serta minim pelatihan teknis yang menyebabkan antrian panjang saat pencairan; ketiga, disposisi pelaksana (skor 85%) menjadi kekuatan utama dengan integritas tinggi yang ditunjukkan oleh komitmen tim aparatur desa dalam menolak tekanan sosial, nepotisme, atau kekerabatan demi menjaga prinsip keadilan, empati sosial yang kuat terhadap warga rentan, serta koordinasi solid antarperangkat yang diperkuat pengawasan internal, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan LSM seperti Mustafa serta Andrikiawan, sehingga mempertahankan legitimasi publik dan kepercayaan warga; keempat, struktur birokrasi (skor 70%) telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Luwu Timur No. 3 Tahun 2024, dan Perdes penetapan KPM melalui musyawarah dengan garis komando vertikal (Bupati → Dinas Sosial → Kades) serta koordinasi horizontal yang baik, tetapi partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan awal masih rendah (lebih bersifat post-factum), antrian pencairan memicu ketidakpuasan, dan celah validasi data akibat faktor personal membuka

ruang penyimpangan yang bertentangan dengan rasionalitas birokrasi Edward III.

Temuan lapangan secara kritis mengonfirmasi bahwa meskipun implementasi prosedural sukses dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi konstitusional (UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin) dan dokumen turunannya, efektivitas substantif terbatas karena celah validasi data penerima manfaat—di mana beberapa keluarga pra-sejahtera layak justru tidak terdaftar sementara keluarga relatif mampu menerima bantuan akibat dugaan kedekatan personal atau kekerabatan—yang tidak hanya mengikis kepercayaan publik dan berpotensi memicu kecemburuan sosial, tetapi juga menurunkan daya redam BLT terhadap kerentanan ekonomi struktural; program berhasil meredam guncangan pendapatan musiman (penurunan 15-20% penjualan UMKM saat krisis) dan likuiditas lokal meningkat, namun belum mampu mentransformasi ketergantungan konsumsi jangka pendek menjadi kemandirian ekonomi struktural tanpa intervensi pemberdayaan lanjutan seperti pelatihan skill pengolahan hasil laut/perkebunan atau inkubasi koperasi desa. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan holistik dan terukur dirancang dalam lima prioritas strategis untuk periode 12 bulan ke depan guna mengoptimalkan BLT: pertama, reformasi komunikasi dengan pengembangan glosarium bahasa sederhana lokal, sesi tanya jawab mingguan dua arah, kanal inklusif seperti

pengumuman suara masjid/radio desa untuk warga non-digital, dan feedback box hybrid (digital-offline); kedua, penguatan sumber daya melalui pelatihan bulanan kompetensi Siskeudes/DTKS, penambahan dua staf kontrak sementara, subsidi kuota internet dusun terpencil, dan full digitalisasi verifikasi real-time; ketiga, pengukuhan disposisi pelaksana via penyusunan kode etik anti-nepotisme dengan sanksi tegas, insentif kinerja berbasis transparansi, dan forum integritas bulanan; keempat, restrukturisasi birokrasi dengan musyawarah partisipatif sejak tahap prapendataan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawasan independen oleh LSM, serta dashboard monitoring penerima manfaat publik via website/aplikasi desa; kelima, integrasi pemberdayaan berkelanjutan berupa program BLT-linked seperti pelatihan UMKM pengolahan ikan tangkap/perkebunan, pembentukan tabungan kelompok pra-sejahtera, dan inkubasi koperasi desa untuk diversifikasi pendapatan. Implementasi rekomendasi ini tidak hanya akan mentransformasi BLT dari instrumen safety net reaktif menjadi springboard proaktif ketahanan ekonomi rumah tangga, tetapi juga berkontribusi strategis pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan 10 (Mengurangi Kesenjangan), sekaligus mewujudkan amanat konstitusional keadilan sosial ala Pancasila dalam tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, transparan, akuntabel, dan

berkelanjutan menuju visi Desa Mandiri 2030 di Kabupaten Luwu Timur maupun skala nasional dengan 70.000+ desa penerima Dana Desa.

#### D. KESIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Harapan menunjukkan kinerja yang relatif baik melalui keempat variabel teori George C. Edward III, namun masih menyisakan tantangan strategis untuk optimalisasi. Komunikasi berjalan cukup efektif melalui multikanal musyawarah desa, papan pengumuman, dan grup WhatsApp, tetapi memerlukan penyederhanaan bahasa dari istilah teknis birokrasi serta pendekatan inklusif bagi warga lansia dan non-digital agar informasi merata tanpa distorsi pemahaman. Sumber daya terhambat keterbatasan SDM dan beban kerja aparatur yang tinggi, sehingga peningkatan kapasitas melalui pelatihan reguler serta digitalisasi pengelolaan data menjadi krusial untuk efisiensi penyaluran yang transparan dan tepat sasaran. Disposisi pelaksana merupakan kekuatan utama dengan komitmen serta integritas tinggi dari Kepala Desa dan perangkatnya yang tetap berpegang pada aturan meski berhadapan tekanan sosial, memperkuat legitimasi publik sebagai fondasi good governance. Struktur birokrasi telah sesuai prosedur dengan pembagian tugas jelas, namun partisipasi masyarakat tahap perencanaan dan koordinasi antarperangkat perlu diperluas melalui musyawarah pra-pendataan guna meningkatkan akuntabilitas dan keadilan.

Secara keseluruhan, reformasi holistik pada keempat variabel ini akan mentransformasi BLT dari bantuan jangka pendek menjadi instrumen ketahanan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

#### E. REFERENSI

- Arisetyawan, K., Rachmawati, L., Nur'aini, S., Nur Adha, A. A., Firmansyah, A. H., Ardini, C. A., & Ariyadi, A. A. (2023). Sosialisasi Digital Marketing UMKM dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa. *International Journal of Community Service Learning*, 7(2), 239–247. <https://doi.org/10.23887/ijcs.v7i2.56878>
- Baihaqi, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., Administrasi, I., Tunai, B. L., & Baihaqi, A. (2023). *Efektivitas Program Bantuan 87*. 5(2), 87–94.
- Dany, G. A. R., & Habibah, S. M. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Warga Non- Pkh Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Dusun Sudimoro. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 435–452. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n2.p435-452>
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *MENARA: Ilmu*, 15(2), 77–84.
- Elvia, V., Yulanda, A., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2023). Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, 1(3), 111–

<https://isora.tpublising.org/index.php/isora>

Ernawati, A., Wahyudi, J., Astuti, A. D., & Aini, S. Q. (2022). Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 57–70.

<https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>

Fadila, S. (2022). *Penanganan Fakir Miskin Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*. <http://repository.uin-suska.ac.id/64708/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/64708/2/SKRIPSISYAFIRA>

[FADILA.pdf](#)

Fatmawati, F., Sulisdiani, I., Marini, M., & Syarmiati, S. (2024). Kepedulian Sosial Masyarakat Perbatasan Dalam Mempertahankan Ketahanan Ekonomi (Kasus Di Temajuk, Paloh, Sambas Kalimantan Barat). *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 7(2), 152–166.

<https://doi.org/10.29408/sosedu.v7i2.25509>

Fitricia, & Hidayah. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Manajemen*. 19(1), 193–208.

Hendrik Kuasa Sihura. (2021). Analisis Dampak Pemberian Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(4), 1313–1316. <https://stp-mataram.e->

<journal.id/JIP/article/view/859%0Ahttps://stp-mataram.e->

<journal.id/JIP/article/download/859/677>

Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 5(June), 1–16.

Herwandi. (2025). *Implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin oleh pemerintah daerah (studi pada desa uwemanje kabupaten sigi) skripsi*.

Irawati, R. I., Ginting, R. P., & Rahayu, N. S. (2023). Strategi Penguatan Peran Kelembagaan Desa Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Di Desa Kendalbulur, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 7(2), 53–71. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i2.389>

Kase, A. D., Sukiatni, D. S., & Kusumandari, R. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timur Tengah Selatan. *Journal of Psychological Reaserch*, 3(2), 301–311.

Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>

M Adi Pratama Putra, Alfinda Adellia Dirli, Wilda Andriani, & Reza MauldyRaharja.

(2023). Menggali Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dalam Membantu Masyarakat. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 189–205.

<https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.781>

Mawarni, T., Handayani, R., & Raudah, S.

(2024). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Desa Patarikan Kecamatan Banjang. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1, 152–161.

<https://ejournal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JKD/PK/article/view/711/586>

Meilianna, R. (2024). Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Pemerintah dan Nonpemerintah Terhadap Pengeluaran Masyarakat (Evaluation of Government and Non-Government Cash Assistance on Expenditure). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 15(1), 109–120.

<https://doi.org/10.22212/jekp.v15i1.3262>

Novi Hadi, Ni Made Musiyani Anjasmari, & Moh. Fajar Noorrahman. (2025). *Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Sungai Kuini Dan Banyu Tajun Hilir)*. 90–102.

Otheliansyah, G., Hizwar, R., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Kemandirian Desa di Masa Pandemi terhadap Kemiskinan Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(2), 94–105.

<https://doi.org/10.33105/jmp.v4i2.409>

Paramita, Panigoro, M., & Sudirman, S. (2022). Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Djaka, P., Panigoro, M., & Sudirman, S. (2022). Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timu. *Jambura : Economic Education Journal*, 4(2), 196–207.

Rizki Zakariya. (2021). Optimalisasi Pencegahan Korupsi Dalam Penggunaan Telles, Keanu. “Pursuing a Grand Theory: Douglass C. North and the Early Making of a New Institutional Social Science (1950-1981).” *EkonomiA* 25, no. 1 (2024): 109–56. <https://doi.org/10.1108/ECON-07-2023-011>. *Journal of Governance Innovation*, 3(10.36636/jogiv.v3i1.507), 15. <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/507/476>

Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>

Sari, A. P. S., Ritonga, M. R. S., Aulia, R., Syahfitri, W., & Firmansyah, H. (2022). Pemberdayaan dan Pengembangan UKM sebagai Pendorong Ekonomi Desa (Studi Kasus pada Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang, Sumatera Utara). *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5), 1262–1269.

<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i5.11198>

Sari, Y. P., & Pranata, D. (2024). Pengaruh Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Inovasi Makro Ekonomi*, 6(3), 108–120.

Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/35089/32872>

Siregar, H. Y., Akim, A., & Djuyandi, Y. (2023). Analisis Kebijakan Pengawasan Program Dan Kegiatan Kepolisian Di Polres Sorong Selatan. *Responsive*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.40029>

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>

Triyanto, D., Kismartini, K., Aprianty, H., & Novelia, P. (2022). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Bengkulu. *Perspektif*, 11(2), 527–532. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>